

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Koperasi dan Usaha Mikro yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro serta Ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Nganjuk.

Rencana Kerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang ditargetkan untuk dicapai. Penetapan tingkat capaian kinerja tersebut diperoleh melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro memperhatikan dan mensinergikan dengan RPJM dari Kementerian terkait baik itu Kementerian Tenaga Kerja RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, serta Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Tidak hanya terbatas pada lembaga Kementerian, namun dalam penyusunan Renja juga memperhatikan RPJM Provinsi Jawa Timur, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Tahun 2019 ini disusun dengan maksud digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2019 yang telah mengakomodir usulan hasil Musrenbang dari tiap Kecamatan di Kabupaten Nganjuk.

1.3.2. Tujuan

Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro dalam kurun waktu satu tahun sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja, hubungan Renja Dinas Tenaga Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Tahun lalu dengan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro.

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, merupakan Perangkat Daerah peleburan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi (Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro) dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Bidang dan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja).

Capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro diukur dari capaian kinerja pada program maupun kegiatan yang ada pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Pada Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan indikator kinerja besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan selama periode 2017 mencapai 66% dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 85% terdapat penurunan yang cukup signifikan sebagai dampak terbatasnya lowongan pekerjaan yang tersedia. Mengatasi hal tersebut, kedepannya harus dimaksimalkan peran dari tenaga fungsional tertentu seperti Pengantar Kerja yang memang sampai dengan saat ini belum ada, pun juga dengan jumlah personil Aparatur Sipil Negara (ASN) utamanya pejabat struktural yang telah purna tugas sampai dengan saat ini belum ada penggantinya. Jumlah personil yang memadai pada akhirnya akan sangat membantu dinas dalam pelaksanaan Job Canvasing dan Job Fair sebagai salah satu sarana penempatan tenaga kerja. Rasio capaian realisasi penggunaan anggaran selama periode 2017 mencapai 93,49%.

Pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan indikator kinerja besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat selama periode 2017 mencapai 93%, hal ini terjadi karena meningkatnya animo masyarakat pada jenis pelatihan tertentu, diantaranya adalah pelatihan menjahit, memasak, pembuatan kue roti, serta tata rias / salon. Rasio capaian realisasi penggunaan anggaran selama

periode 2017 sangat baik yakni mencapai 96%.

Pada Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, realisasi penempatan transmigran selama periode RPJMD cenderung mengalami penurunan. Realisasi penempatan transmigran tertinggi adalah pada tahun 2016, yakni sebanyak 20 KK. Angka terendah tercatat pada tahun 2017 karena tidak ada pemberangkatan sama sekali. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan jumlah kuota untuk Kabupaten Nganjuk. Semakin menurunnya target penempatan transmigrasi ini disebabkan turunnya kuota untuk Pemerintah Daerah yang berdampak pada penurunan kuota untuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Realisasi capaian kinerja cenderung masih di bawah target. Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi cukup besar, akan tetapi masyarakat hanya berminat pada lokasi- lokasi tertentu saja. Dengan demikian meskipun daftar tunggu peminat transmigrasi cukup banyak, ketika sudah ditentukan lokasi tujuan, belum tentu masyarakat berminat dengan lokasi tersebut. Rasio capaian realisasi penggunaan anggaran selama periode 2017 sangat baik yakni berkisar 96,41%.

Pada Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja dengan indikator kinerja jumlah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJS melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan semakin sadar akan arti pentingnya BPJS sebagai salah satu bentuk perlindungan dasar bagi pekerjanya, disamping itu pula ketegasan Pemerintah Daerah dalam menerapkan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bagi perusahaan yang belum mengikut sertakan pekerjanya dalam program BPJS membuat Perusahaan takut untuk melakukan pelanggaran. Namun indikator terkait besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama mengalami penurunan disebabkan tidak adanya tenaga fungsional tertentu Mediator Hubungan Industrial. Secara keseluruhan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi tidak terlalu banyak mengingat belum banyak industri padat karya yang tumbuh di Kabupaten Nganjuk. Rasio capaian realisasi penggunaan anggaran selama periode 2017 sangat baik yakni berkisar 96,07%.

Pada Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan indikator kinerja persentase koperasi aktif menunjukkan hasil yang cukup positif dengan capaian 94%. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran pengurus koperasi dalam melaksanakan agenda Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pengurus cukup

tinggi. Rasio capaian realisasi penggunaan anggaran pada periode 2017 sebesar 96,21%.

Pada Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan usaha mikro yang mempunyai legalitas menunjukkan lonjakan yang signifikan pada tahun 2015 sebagai dampak dipermudahnya perijinan Ijin Usaha Mikro (IUM) yang sebelumnya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sekarang cukup dikeluarkan oleh Camat dimana domisili pemohon berada. Hal ini yang menyebabkan pengajuan IUM meningkat hingga 2.152%. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan sampai angka dibawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa animo masyarakat terkait dengan pengajuan IUM telah mencapai puncaknya dan di tahun – tahun berikutnya berjalan sangat lamban. Rasio capaian realisasi penggunaan anggaran pada periode 2017 sebesar 85,11%.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN NGANJUK

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-5)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja SKPD Tahun (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja									
2.01.01.	Bidang Urusan Ketenagakerjaan									
2.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran								
2.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbayarnya kebutuhan pengiriman surat menyurat dan bea materai	60 Bln	48 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	48 Bln	80
2.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, daya air dan listrik	60 Bln	48 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	48 Bln	80

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01.	01.	01.	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor	45 jenis	45 jenis	45 jenis	45 jenis	100	45 jenis	45 jenis	100
2.01.	01.	01.	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	16 Jenis	16 jenis	16 jenis	16 jenis	100	16 jenis	16 jenis	100
2.01.	01.	01.	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi dan peralatan	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	100	11 jenis	11 jenis	100
2.01.	01.	01.	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Terlaksananya pembayaran surat kabar/majalah	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	100
2.01.	01.	01.	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya pengadaan makan dan minum untuk rapat staf dan minum pegawai	45 PNS	45 PNS	45 PNS	45 PNS	100	45 PNS	45 PNS	100
2.01.	01.	01.	18	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	245 OK	245 OK	245 OK	245 OK	100	245 OK	245 OK	100

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01.	01.	01.	20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	60 Bln	48 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	48 Bln	80
2.01.	01.	01.	20	Pengadaan Peralatann dan Bahan Pembersih	Terlaksananya kebersihan lingkungan kerjanya yang bersih dan nyaman	26 Jenis	26 Jenis	26 Jenis	26 Jenis	100	26 Jenis	26 Jenis	100
2.01.	01.	02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Layak Pakai								
2.01.	01.	02.	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya kebutuhan perlengkapan kantor AC 3 unit	15 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100	3 unit	9 unit	60
2.01.	01.	02.	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	2 jenis	100
2.01.	01.	02.	10	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur yang memadai	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	2 jenis	100

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01.	01.	02.	22	Pengadaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Jl Dermojoyo Nganjuk dan Pembayaran 5 orang petugas keamanan kantor	1 gedung / 60 bulan	1 gedung / 48 bulan	1 gedung / 12 bulan	1 gedung / 12 bulan	100	1 gedung / 12 bulan	1 gedung / 48 bulan	80
2.01.	01.	02.	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kendaraan roda 4 sebanyak 5 unit dan roda 2 sebanyak 19 unit dan pembayaran 1 orang sopir, 1 orang pengurus dan penyimpan barang daerah	24 unit	24 unit	24 unit	24 unit	100	24 unit	24 unit	100
2.01.	01.	02.	26	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya peralatan dan perbaikan gedung kantor	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	5 jenis	5 jenis	100
2.01.	01.	02.	28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perbaikan gedung kantor	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis	7 jenis	100

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01.	01.	02.	29	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan sarana aparatur	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	4 jenis	100
2.01.	01.	06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Perencanaan/ Laporan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi								
2.01.	01.	06.	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja LKPJ, Renstra, Renja, LPPD, Lakip, Tapkin, Evaluasi Renja	60 bulan	60 bulan	60 bulan	60 bulan	100	60 bulan	60 bulan	100
2.01.	01.	06.	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	60 bulan	60 bulan	60 bulan	60 bulan	100	60 bulan	60 bulan	100
2.01.	01.	06.	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	60 bulan	60 bulan	60 bulan	60 bulan	100	60 bulan	60 bulan	100
2.01.	01.	15.		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Pencaker Yang Dilatih yang Sudah Bekerja								
2.01.	01.	15.	39	Pelatihan Tata Rias Pengantin	Meningkatnya keterampilan pencaker dalam hal tata rias pengantin	380 orang	260orang	40 orang	40 orang	100	40	340	89,4

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01.	01.	15.	10	Pemanduan Terapan Prosesing Teknologi Padat Karya bagi Masyarakat Desa	Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam hal pemanduan terapan prosesing teknologi padat karya	700 orang	380 orang	140 orang	140 orang	100	100 orang	380 orang	88
2.01.	01.	15.	15	Pelatihan Menjahit Modes	Meningkatnya keterampilan pencaker dalam hal pelatihan keterampilan menjahit	360 orang	240 orang	40 orang	40 orang	100	40 orang	240 orang	88
2.01.	01.	15.	16	Pelatihan Servis Sepeda Motor	Meningkatnya keterampilan pencaker dalam hal servis sepeda motor	360 orang	240 orang	60 orang	60 orang	100	60 orang	240 orang	100
2.01.	01.	15.	18	Pelatihan Tata Rambut	Meningkatnya keterampilan pencaker dalam hal tata rambut	400 orang	240 orang	40 orang	40 orang	100	40 orang	320 orang	80
2.01.	01.	15.	35	Pelatihan Pengembangan Produktifitas Perusahaan	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	500 orang	320 orang	80 orang	80 orang	100	80 orang	480 orang	96
2.01.	01.	16.		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencaker Terdaftar yang Ditempatkan								
2.01.	01.	16.	01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah pencaker yang mendapatkan informasi	15.000 orang	8.000 orang	2.000 orang	2.000 orang	100	2.000 orang	12.000 orang	80
2.01.	01.	16.	12	Pelatihan Pendayagunaan Pasir dan Semen	Meningkatnya keterampilan pencaker dalam hal pendayagunaan pasir dan semen	340 orang	200 orang	40 orang	40 orang	100	40 orang	280 orang	80

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01.	01.	16.	16	Perluasan Kesempatan Kerja Padat Karya Pengerukan Saluran	Meningkatnya masyarakat setengah penganggur yang mendapatkan pekerjaan sementara	1.500 orang	900 orang	200 orang	200 orang	100	200 orang	1300 orang	86
2.01.	01.	16.	21	Job Fair	Jumlah pencaker yang mengunjungi job fair	15.000 orang	8.000 orang	2.000 orang	2.000 orang	100	2.000 orang	12.000 orang	80
2.01.	01.	16.	21	Pendayagunaan Pasir dan Semen (PIK)	Meningkatnya keterampilan pencaker dalam hal pendayagunaan pasir dan semen	250 orang	150 orang	40 orang	40 orang	100	40 orang	230 orang	92
2.01.	01.	17.		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan								
2.01.	01.	17.	21	Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Meningkatnya pemahaman pekerja dan pengusaha terkait norma kerja	180 orang	90 orang	30 orang	30 orang	100	30 orang	150 orang	83
2.01.	01.	17.	23	Sosialisasi UMK Nganjuk 2018 dan Pemantauan UMK Nganjuk 2017	Meningkatnya stakeholder ketenagakerjaan yang mengetahui maupun mematuhi ketentuan UMK	330 orang	200 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang	300 orang	90,9
2.01.	01.	17.	24	Bimtek Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Meningkatnya pemahaman pekerja terkait mekanisme perselisihan HI	180 orang	90 orang	30 orang	30 orang	100	30 orang	150 orang	83

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01.	01.	17.	25	Pembinaan Kelembagaan Sarana Hubungan Industrial (HI)	Meningkatnya pemahaman pekerja dan pengusaha terkait kelembagaan HI	180 orang	90 orang	30 orang	30 orang	100	30 orang	150 orang	83
2.01.	01.	18.		Program Informasi, Monitoring dan Perencanaan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi									
2.01.	01.	18.	01.	Sosialisasi di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait tugas dan fungsi Disnakerkopum	1.350 orang	750 orang	240 orang	240 orang	100	200 orang	1.190 orang	88
2.01.	01.	18.	02.	Penyusunan Buku Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terwujudnya buku profil tentang kondisi ketenagakerjaan koperasi dan usaha mikro	250 buku	150 buku	50 buku	50 buku	100	50 buku	200 buku	80
2.01.	01.	19.		Program Pembinaan Lingkungan Sosial									
2.01.	01.	19.	10.	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Menjahit (DBHCHT)	Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam hal menjahit	240 orang	120 orang	40 orang	40 orang	100	40 orang	200 orang	83,3
2.01.	01.	19.	11.	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Service Sepeda Motor (DBHCHT)	Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam hal service sepeda motor	240 orang	120 orang	40 orang	40 orang	100	40 orang	200 orang	83,3

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01.	01.	19.	12.	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Kewirausahaan dan Olahan Makanan dan Minuman (DBHCHT)	Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam hal olahan makanan minuman	420 orang	220 orang	60 orang	60 orang	100	60 orang	340 orang	80,9
2.01.	01.	19.	13.	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (DBHCHT)	Meningkatnya masyarakat setengah penganggur yang mendapatkan pekerjaan sementara	1.200 orang	760 orang	140 orang	140 orang	100	120 orang	1.020 orang	85
2.11.				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan Usaha Mikro									
2.11.	01.	16.		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang telah Memperoleh IUM								
2.11.	01.	16.	03.	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti kegiatan	670 WUB	430 WUB	120 WUB	120 WUB	100	60 WUB	610 WUB	91,04
2.11.	01.	16.	05.	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Terselenggaranya promosi dan pameran produk UMKM	25 kali	10	5 kali	5 kali	100	5 kali	20 kali	80

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.	01.	16.	23.	Pelatihan Makanan dan Minuman (PIK)	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan pelatihan olahan makanan dan minuman	700 WUB	100 WUB	420 WUB	420 WUB	100	120 WUB	640 WUB	91,4
2.11.	01.	16.	15.	Pelatihan Lilin Hias (PIK)	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan pelatihan lilin hias	320 WUB	80 WUB	150 WUB	150 WUB	100	60 WUB	290 WUB	90,6
2.11.	01.	16.	24.	Pelatihan Menjahit dan Bordir (PIK)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan menjahit dan bordir	180 WUB	60 WUB	45 WUB	45 WUB	100	50 WUB	155 WUB	86,1
2.11.	01.	16.	25.	Pelatihan Anyaman (PIK)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan anyaman	270 WUB	60 WUB	60 WUB	60 WUB	100	60 WUB	220 WUB	81,48
2.11.	01.	16.	26.	Pelatihan Kewirausahaan dan Akuntansi	Jumlah WUB yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan akuntansi	250 WUB	60 WUB	90 WUB	90 WUB	100	40 WUB	190 WUB	76
2.11.	01.	16.	27.	Pelatihan Batik (PIK)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan batik	250 WUB	40 WUB	40 WUB	40 WUB	100	50 WUB	180 WUB	72
2.11.	01.	16.	28.	Pelatihan Souvenir (PIK)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan souvenir	200 WUB	50 WUB	60 WUB	60 WUB	100	50 WUB	160 WUB	80
2.11.	01.	16.	29.	Pendataan dan Pemetaan usaha mikro dan kecil	Terlaksananya pendataan usaha mikro	20 Kec	20 Kec.	20 Kec.	20 Kec.	100	20 Kec.	20 Kec.	100

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.	01.	17.		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Kecil Menengah	Persentase pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha								
2.11.	01.	17.	17	Penyelesaian Dana Bergulir	Jumlah usaha mikro yang menyelesaikan tanggungan dana bergulir	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	100	150 UMKM	150 UMKM	100
2.11.	01.	17.	18	Fasilitasi Permodalan dan Monev Program KUR	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi permodalan	250 UMKM	140 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	100	20 UMKM	200 UMKM	80
2.11.	01.	21.		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif								
2.11.	01.	21.	05.	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Meningkatnya kinerja kelembagaan koperasi	850 Kop	500 Kop	150 Kop	150 Kop	100	100 Kop	750 Kop	88,8
2.11.	01.	21.	14.	Bimbingan Teknis Dasar-dasar Perkoperasian	Meningkatnya kemampuan dasar tetang perkoperasian	600 orang	150 orang	180 orang	180 orang	100	150 orang	480 orang	80
2.11.	01.	21.	16.	Revitalisasi dan Pembubaran Koperasi Tidak Aktif	Jumlah koperasi yang dibubarkan maupun direvitalisasi	180 Kop	100 Kop	30 kop	30 kop	100	30 Kop	160 Kop	88,8
2.11.	01.	21.	19.	Temu Usaha Koperasi	Meningkatnya pemahaman pengurus dan pengelola dengan melakukan study banding	600 orang	300 orang	100 orang	100 orang	100	100 orang	500 orang	83,3

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.08.				Urusan Pilihan Transmigrasi									
3.08.	02.	15.		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Calon Transmigran yang Diberangkatkan								
3.08.	02.	15.	07.	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pengiriman Transmigran	Terlaksananya kunjungan penjajagan	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	100	3 lokasi	3 lokasi	100
3.08.	02.	15.	08.	Fasilitasi Penempatan Transmigran	Terlaksananya kunjungan penjajagan	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	100	3 lokasi	3 lokasi	100
3.08.	02.	15.	09.	Sosialisasi, Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisas terkait transmigrasi	800 orang	280 orang	240 orang	240 orang	100	200 orang	720 orang	90

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, terdapat beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam hal peningkatan pelayanan baik dari kondisi internal dan eksternal, antara lain:

Kondisi Internal

a. Faktor Pendorong

- 1) Kabupaten Nganjuk memiliki potensi sebagai daerah kawasan industri alternatif di Jawa Timur, karena masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan serta angkatan kerja yang cukup banyak;
- 2) Kondisi hubungan industrial yang relatif kondusif;
- 3) Potensi Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu kawasan industri alternatif diharapkan mampu menumbuhkan usaha mikro baru

b. Faktor Penghambat

- 1) Belum diterapkannya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dengan tegas dan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 2) Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi
- 3) Belum optimalnya personil dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya
- 4) Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi

Kondisi Eksternal

a. Faktor Pendorong

- 1) Tersedianya Infrastruktur perhubungan yang memadai khususnya dampak pembangunan jalan tol trans jawa.
- 2) Investor luar daerah mulai mengalihkan investasinya terutama industri padat karya ke daerah yang relatif kondusif hubungan industrialnya, pun juga Upah Minimum Kabupaten Nganjuk dipandang masih rasional
- 3) Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti fasilitasi maupun pelatihan
- 4) Jumlah dan potensi (tumbuhnya) Usaha Mikro cukup besar
- 5) Keberadaan forum komunikasi (Forkom) UMKM sebagai sarana komunikasi untuk pengembangan usaha

- 6) Banyaknya even pameran/promosi bagi UMKM
- 7) Banyaknya jumlah koperasi
- 8) Teknologi informasi yang semakin maju

b. Faktor Penghambat

- 1) Masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran
- 2) Persaingan produk sejenis dari luar daerah
- 3) Kurangnya sinergisitas kebijakan/regulasi dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
- 4) Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
- 5) Banyak tenaga kerja belum bersertifikasi kompetensi (belum lulus uji kompetensi)
- 6) Rendahnya motivasi untuk bersaing di pasar kerja lokal, nasional maupun global
- 7) Masih rendahnya kesejahteraan pekerja
- 8) Minat masyarakat yang terbatas pada jenis jenis pekerjaan tertentu
- 9) Semakin berkembangnya lembaga keuangan mikro selain koperasi di masyarakat
- 10) Kurang konsistennya masyarakat pada satu bidang usaha yang telah dirintis

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sektor ketenagakerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, sedangkan pelayanan di sektor koperasi dan usaha mikro adalah peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro.

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu- isu strategis

dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan yang kerap dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro adalah :

1. Masih cukup besarnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2. Rendahnya produktifitas tenaga kerja
3. Terbatasnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kualifikasi jabatan fungsional tertentu seperti Mediator Hubungan Industrial maupun Pengantar Kerja
4. Terbatasnya kuota penempatan transmigran tidak sebanding dengan animo masyarakat yang ingin mengikuti program transmigrasi.
5. Masih adanya sengketa antara pengusaha dan pekerja
6. Masih rendahnya persentase koperasi yang aktif dan sehat
7. Masih rendahnya jumlah usaha mikro yang memiliki ijin usaha
8. Rendahnya daya saing produk lokal

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga kerja koperasi dan usaha mikro serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten nganjuk, yakni sebagai berikut:

- a. Peningkatan jumlah penyerapan angkatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja
- b. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis
- c. Peningkatan volume usaha koperasi
- d. Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki ijin usaha

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Didalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk melaksanakan 12 (dua belas) program dengan 94 (sembilan puluh empat) kegiatan sebagaimana termuat dalam Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2018. Hal ini bertolak belakang dengan kemampuan APBD tahun berjalan sehingga kegiatan yang tercantum tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan. Dari 94 (sembilan puluh empat) kegiatan yang ada dalam RKPD hanya 60 kegiatan yang bisa direalisasikan dan dibiayai oleh

APBD.

Renja yang didasarkan dengan Rancangan Awal RKPD ini memperlihatkan betapa banyaknya usulan kegiatan yang disampaikan dan seringkali usulan tersebut tidak dapat terakomodir dalam postur pendanaan APBD tahun berjalan. Namun Dinas tetap berupaya untuk melaksanakan usulan tersebut dengan mencari skema pendanaan non APBD baik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dari dana APBN Kementrian terkait. Hal ini merupakan bentuk komitmen Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro untuk senantiasa berusaha mengakomodir usulan kegiatan yang masuk sepanjang usulan tersebut memberikan dampak percepatan tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro tetap mengacu pada amanat UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025, UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian serta UU No.20/2008 tentang UMKM. Terkait pembangunan ketenagakerjaan, RPJPN menekankan pada penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal sebagai bagian dari upaya mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan terkait dengan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro diarahkan untuk mendukung misi peningkatan daya saing bangsa dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan faktor internal dan eksternal, kondisi umum daerah serta tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk yang diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Kabupaten Nganjuk, maka tujuan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk yaitu :

1. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis
2. Terwujudnya kelembagaan koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing

Adapun terkait dengan tujuan “*Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis*” menggunakan indikator tujuan sebagai berikut :

1. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2. Persentase Angka Sengketa per Tahun

Sedangkan terkait dengan tujuan “*Terwujudnya kelembagaan koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing*” menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
2. Persentase Usaha Mikro yang Mempunyai Legalitas Usaha

Berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mempunyai sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyerapan angkatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja
2. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
3. Meningkatnya volume usaha koperasi
4. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki Ijin Usaha

Sasaran yang hendak dicapai tersebut menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
2. Persentase kasus perselisihan HI yang diselesaikan diluar pengadilan
3. Persentase koperasi sehat
4. Persentase pertumbuhan usaha mikro yang memiliki Izin Usaha Mikro (IUM)

III.3. Program dan Kegiatan

Didalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk melaksanakan 12 (dua belas) program dengan 118 (seratus delapan belas) sebagaimana termuat dalam Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2019 berikut ini :

No	Nama Kegiatan	Jumlah Program dan Kegiatan (n)	Keluaran Kegiatan	
			Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp463.000.000,00		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 3.000.000,00	Terlaksananya pengiriman surat menyurat dan belanja materai	500 surat dan 150 materai
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 90.000.000,00	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan daya listrik, telepon dan internet serta kebutuhan air	12 bulan
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 60.000.000,00	Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor oleh pihak ketiga	12 bulan
4	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 40.000.000,00	Terwujudnya pengadaan alat tulis kantor untuk dinas	45 Jenis
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 18.000.000,00	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16 Jenis
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 5.000.000,00	Terlaksananya Penerangan Kantor	11 Jenis
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 5.000.000,00	Terlaksananya pembayaran taguhan surat kabar dan majalah	12 bulan
8	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 30.000.000,00	Terlaksananya pengadaan makan dan minum untuk rapat staf dan minum pegawai	30 orang / 12 bulan
9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 200.000.000,00	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	275 orang/kali
10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 12.000.000,00	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	12 bulan
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 745.000.000,00		
1	Pembangunan tempat parkir	Rp 190.000.000,00	Terlaksananya pembangunan tempat parkir	1 paket
2	Pengadaan Kamera CCTV	Rp 10.000.000,00	Terlaksananya pengadaan paket kamera cctv	1 paket
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 200.000.000,00	Pembayaran honorarium petugas pengamanan kantor / penjaga malam	12 bulan
			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk	1 paket
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 95.000.000,00	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda empat	5 unit
			Honorarium PNS dan Non PNS	3 orang
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 15.000.000,00	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 Jenis
6	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Rp 20.000.000,00	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala terhadap peralatan gedung kantor	8 Jenis
7	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Rp 10.000.000,00	Terlaksananya perawatan peralatan prasarana aparatur sipil negara	4 Jenis
8	Pemeliharaan rutin/berkala Fasilitas Umum	Rp 10.000.000,00	Terlaksananya pemeliharaan taman dan halaman kantor	12 bulan

9	Pembangunan jalan penghubung antar gedung kantor	Rp 195.000.000,00	Terlaksananya pembangunan jalan penghubung antar gedung kantor	1 paket
III	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp 12.000.000,00		
1	Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani	Rp 12.000.000,00	Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani	12 bulan
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 25.000.000,00		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 10.000.000,00	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	4 Jenis
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Rp 5.000.000,00	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	2 Semester
3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 5.000.000,00	Terlaksananya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 tahun / 1 kali
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 5.000.000,00	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD	1 tahun / 1 kali
V	Program Informasi, Monitoring dan Perencanaan Ketenagakerjaan	Rp 100.000.000,00		
1	Sosialisasi di Bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro serta Transmigrasi	Rp 60.000.000,00	Terlaksananya sosialisasi di bidang ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro serta transmigrasi	5 Kecamatan
2	Penyusunan Buku Profil Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk	Rp 40.000.000,00	Terlaksananya penyusunan buku profil ketenagakerjaan koperasi dan usaha mikro kabupaten nganjuk	50 buku
VI	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 3.433.486.650,00		
1	Pelatihan Servis Sepeda Motor	Rp 200.000.000,00	Terlaksananya pelatihan servis sepeda motor	50 Orang
2	Pelatihan Menjahit Modes	Rp 160.000.000,00	Terlaksananya pelatihan menjahit modes	83 orang
3	Pelatihan Memasak	Rp 60.000.000,00	Terlaksananya pelatihan memasak	20 Orang
4	Pelatihan Sablon	Rp 50.000.000,00	Terlaksananya pelatihan sablon	20 Orang
5	Pelatihan Potong Rambut (PIK)	Rp 40.000.000,00	Terlaksananya kegiatan pelatihan potong rambut	35 orang
6	Pelatihan Service Sepeda Motor (PIK)	Rp 165.000.000,00	Terlaksananya kegiatan pelatihan servis sepeda motor	3 lokasi
7	Pelatihan Bengkel Las (PIK)	Rp 51.486.650,00	Terlaksananya pelatihan bengkel las	35 orang
8	Pelatihan Mebelair	Rp 30.000.000,00	Terlaksananya pelatihan mebelair	20 Orang
9	Pelatihan Tata Rias Pengantin	Rp 150.000.000,00	Terlaksananya pelatihan tata rias pengantin	100 Orang
10	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	Rp 40.000.000,00	Terlaksananya pelatihan pembuatan pupuk organik	30 orang
11	Pelatihan Tukang Batu dan Tukang Kayu	Rp 200.000.000,00	Terlaksananya pelatihan Tukang Batu dan Tukang Kayu	150 orang
12	Pelatihan Memasak (PIK)	Rp 40.000.000,00	Terlaksananya pelatihan memasak	30 orang
13	Pelatihan Service Elektronik (Lampu Neon)	Rp 30.000.000,00	Terlaksananya pelatihan service elektronik (lampu neon)	30 orang
14	Pelatihan Sablon (PIK)	Rp 120.000.000,00	Terlaksananya pelatihan sablon	80 orang

15	Pelatihan Otomotif dan Las	Rp 60.000.000,00	Terlaksananya pelatihan otomotif dan las	40 orang
16	Pelatihan Keterampilan Memasak	Rp 560.000.000,00	Terlaksananya pelatihan memasak	420 orang
17	Pelatihan Keterampilan Meubel / Ukir	Rp 40.000.000,00	Terlaksananya pelatihan keterampilan meubel / ukir	20 Orang
18	Pelatihan Keterampilan Rias Salon / Pengantin	Rp 150.000.000,00	Terlaksananya pelatihan keterampilan rias salon / pengantin	100 orang
19	Pelatihan Keterampilan Elektro	Rp 30.000.000,00	Terlaksananya pelatihan keterampilan eletro	20 Orang
20	Pelatihan Keterampilan Las	Rp 50.000.000,00	Terlaksananya pelatihan keterampilan las	40 Orang
21	Pelatihan Keterampilan Desain Grafis / Digital Printing	Rp 90.000.000,00	Terlaksananya pelatihan keterampilan desain grafis / digital printing	60 orang
22	Pelatihan Keterampilan Budi Daya Jamur	Rp 75.000.000,00	Terlaksananya pelatihan keterampilan pembuatan paving block dan atau pot bunga	60 orang
23	Pelatihan Keterampilan Tata Rambut	Rp 30.000.000,00	Terlaksananya pelatihan keterampilan tata rambut	25 orang
24	Pelatihan Keterampilan Service Sepeda Motor	Rp 480.000.000,00	Terlaksananya pelatihan service sepeda motor	320 orang
25	Pelatihan Tata Rias (PIK)	Rp 122.000.000,00	Terlaksananya pelatihan tata rias	2 lokasi
26	Pelatihan Menjahit Modes (PIK)	Rp 50.000.000,00	Terlaksananya pelatihan menjahit modes	33 orang
27	Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja	Rp 150.000.000,00	Terlaksananya penempatan tenaga kerja di perusahaan	40 orang
28	Pelatihan Keterampilan Masakan Olahan	Rp 210.000.000,00	Terlaksananya kegiatan pelatihan keterampilan masakan olahan	120 orang
VII	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 3.706.000.000,00		
1	Job Fair	Rp 200.000.000,00	Terlaksananya job fair / pameran kesempatan kerja	2.000 Orang
2	Pembinaan Kegiatan Antar Kerja untuk Kepala Desa, BKK dan PPTKIS	Rp 100.000.000,00	Terlaksananya pembinaan antar kerja untuk Kepala Desa, BKK dan PPTKIS	10 kali
3	Perluasan Kesempatan Kerja Padat Karya Pengerukan Saluran	Rp 750.000.000,00	Terlaksananya kegiatan padat karya pengerukan saluran	6.000 m/330 orang
4	Pelatihan Keterampilan Pembuatan Paving Block, Pot Bunga dan/atau Batako	Rp 250.000.000,00	Terlaksananya pelatihan keterampilan pembuatan paving block, pot bunga dan/atau batako	40 orang
5	Perluasan Kesempatan Kerja Padat Karya Pengerasan Jalan	Rp 750.000.000,00	Terlaksananya padat karya pengerasan jalan	1.500 m/189 orang
6	Pelatihan Pembuatan Paving Block, Pot Bunga dan/atau Batako (PIK)	Rp 120.000.000,00	Terlaksananya pelatihan pembuatan paving block, pot bunga dan/atau batako	60 orang
7	Pelatihan Keterampilan Pembuatan Paving Block dan atau Pot Bunga	Rp 60.000.000,00	Terlaksananya pelatihan keterampilan pembuatan paving block dan atau pot bunga	40 orang
8	Padat Karya Pengerukan Saluran	Rp 1.000.000.000,00	Terlaksananya padat karya pengerukan saluran	5 lokasi

9	Padat Karya Pengerukan Saluran (PIK)	Rp 411.000.000,00	Terlaksananya kegiatan padat karya pengerukan saluran	4 lokasi
10	Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja	Rp 65.000.000,00	Terlaksananya penyebaran informasi lowongan kerja dalam dan luar negeri	2.000 Orang
VIII	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rp 570.000.000,00		
1	Sosialisasi Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran	Rp 60.000.000,00	Terlaksananya sosialisasi pendaftaran dan seleksi calon transmigran	240 orang
2	Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah Pengiriman Transmigran	Rp 160.000.000,00	Terlaksananya peningkatan kerja sama antar daerah pengiriman transmigran	4 Lokasi
3	Fasilitasi Penempatan Transmigran	Rp 150.000.000,00	Terlaksananya fasilitasi penempatan transmigran	20 Orang
4	Monitoring Pasca Penempatan Transmigrasi	Rp 200.000.000,00	Terlaksananya monitoring pasca penempatan transmigrasi	4 lokasi
IX	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp 520.000.000,00		
1	Sosialisasi UMK Nganjuk Tahun 2020	Rp 80.000.000,00	Terlaksananya sosialisasi upah minimum Kabupaten Nganjuk Tahun 2020	80 orang / 40 Perusahaan
2	Pemantauan Upah Minimum Kabupaten Nganjuk Tahun 2019	Rp 30.000.000,00	Terlaksananya Pemantauan Upah Minimum Kabupaten Nganjuk Tahun 2019	30 Perusahaan
3	Pembinaan Hubungan Industrial	Rp 50.000.000,00	Terlaksananya pembinaan hubungan industrial	40 Perusahaan
4	Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Hubungan Industrial	Rp 50.000.000,00	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial	40 Perusahaan
5	Verifikasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh	Rp 30.000.000,00	Terlaksananya verifikasi serikat pekerja / serikat buruh	15 SP/SB
6	Pembinaan Norma dan Syarat Kerja	Rp 50.000.000,00	Terlaksananya pembinaan norma dan syarat kerja	40 Perusahaan
7	Pendataan Sarana Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Rp 60.000.000,00	Terlaksananya pendataan hubungan industrial dan syarat kerja	80 Perusahaan
8	Penetapan Upah Minimum Kabupaten Nganjuk Tahun 2020	Rp 70.000.000,00	Terlaksananya penetapan upah minimum kabupaten nganjuk tahun 2020	UMK Kab. Nganjuk Tahun 2020
9	Bimtek Teknik Negosiasi bagi Pengusaha dan Pekerja	Rp 50.000.000,00	Terlaksananya bimtek teknik negosiasi bagi pengusaha dan pekerja	40 orang / 20 perusahaan
10	Pembinaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Rp 50.000.000,00	Terlaksananya pembinaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	40 Perusahaan
X	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp 3.254.202.900,00		
1	Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro	Rp 120.000.000,00	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi pelaku usaha mikro	100 orang
2	Pelatihan Kewirausahaan dan Akutansi	Rp 70.000.000,00	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan akuntansi	60 orang
3	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Rp 400.000.000,00	Terlaksananya fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	5 kali kegiatan pameran
4	Sosialisasi Perlindungan Hukum bagi Produk Usaha Mikro	Rp 60.000.000,00	Terlaksananya sosialisasi perlindungan hukum bagi produk usaha mikro	50 orang
5	Pelatihan Anyaman Plastik	Rp 60.000.000,00	Terlaksananya pelatihan anyaman plastik	40 orang

6	Pelatihan Tas Sulam Benang Rajut	Rp 60.000.000,00	Terlaksananya pelatihan tas sulam benang rajut	30 orang
7	Pelatihan Hantaran	Rp 70.000.000,00	Terlaksananya pelatihan hantaran	50 orang
8	Pelatihan Menjahit (PIK)	Rp 185.000.000,00	Terlaksananya pelatihan menjahit	4 lokasi
9	Pelatihan Pembuatan Kue dan Proses Pengemasannya	Rp 30.000.000,00	Terlaksananya pelatihan pembuatan kue dan proses pengemasannya	20 Orang
10	Pelatihan Olahan dengan Bahan Dasar Bunga Mawar	Rp 30.000.000,00	Terlaksananya pelatihan olahan dengan bahan dasar bunga mawar	20 Orang
11	Pelatihan Pembuatan Jenang Ketan	Rp 30.000.000,00	Terlaksananya pelatihan pembuatan jenang ketan	20 Orang
12	Pelatihan Pembuatan Tas	Rp 150.000.000,00	Prosentase Pertumbuhan Usaha Mikro Berkualitas	50 orang
13	Pelatihan Pembuatan Usaha Tahu	Rp 60.000.000,00	Terlaksananya pelatihan pembuatan usaha tahu	60 orang
14	Pelatihan Pembuatan Kripik Tempe (PIK)	Rp 35.000.000,00	Terlaksananya kegiatan pelatihan pembuatan kripik tempe	20 Orang
15	Pelatihan Pembuatan Aneka Kue Kering (PIK)	Rp 30.000.000,00	Terlaksananya kegiatan pelatihan pembuatan kue kering	30 orang
16	Pelatihan Kewirausahaan (PIK)	Rp 277.755.300,00	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan	3 lokasi
17	Pelatihan Handycraft / Aneka Kerajinan Tangan	Rp 25.000.000,00	Terlaksananya pelatihan handycraft / aneka kerajinan tangan	20 Orang
18	Pelatihan Bordir	Rp 90.000.000,00	Terlaksananya pelatihan bordir	60 orang
19	Pelatihan Pemasaran Secara On Line	Rp 30.000.000,00	Terlaksananya pelatihan pemasaran secara on line	20 Orang
20	Pelatihan Memasak Non Beras	Rp 50.000.000,00	Terlaksananya pelatihan memasak non beras	40 Orang
21	Pelatihan Batik	Rp 40.000.000,00	Terlaksananya pelatihan membuat batik	30 orang
22	Pelatihan Olahan Bawang Merah Goreng	Rp 50.000.000,00	Terlaksananya pelatihan olahan bawang merah goreng	50 orang
23	Pelatihan Pembuatan Souvenir Desa Wisata	Rp 153.000.000,00	Terlaksananya pelatihan pembuatan souvenir desa wisata	100 orang
24	Pelatihan Keterampilan Pembuatan Aneka Souvenir	Rp 100.000.000,00	Terlaksananya pelatihan keterampilan pembuatan aneka souvenir	80 orang
25	Pelatihan Keterampilan Pembuatan Aneka Kue	Rp 180.000.000,00	Terlaksananya pelatihan keterampilan pembuatan aneka kue	120 orang
26	Pelatihan Keterampilan Pembuatan Hantaran Hajatan	Rp 100.000.000,00	Terlaksananya pelatihan keterampilan pembuatan hantaran hajatan	80 orang
27	Pelatihan Keterampilan Bordir	Rp 90.000.000,00	Terlaksananya pelatihan keterampilan bordir	60 orang
28	Pelatihan Keterampilan Olahan Bawang Goreng	Rp 60.000.000,00	Terlaksananya pelatihan keterampilan olahan bawang goreng	50 orang
29	Pelatihan Keterampilan Olahan Emping Jagung	Rp 30.000.000,00	Terlaksananya pelatihan keterampilan olahan emping jagung	20 Orang
30	Pelatihan Keterampilan Menjahit	Rp 410.000.000,00	Terlaksananya pelatihan menjahit	340 orang
31	Pelatihan Keterampilan Pembuatan Souvenir/Handycraft (PIK)	Rp 103.136.650,00	Terlaksananya pelatihan pembuatan souvenir/handycraft	3 lokasi
32	Pelatihan Pengemasan Produk Makanan (PIK)	Rp 50.000.000,00	Terlaksananya pelatihan pengemasan produk makanan	25 orang
33	Pelatihan Batik (PIK)	Rp 25.310.950,00	Terlaksananya pelatihan batik	20 orang
XI	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha	Rp 115.000.000,00		

	Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
1	Penyelesaian Dana Bergulir	Rp 15.000.000,00	Terlaksananya penyelesaian dana bergulir	150 Usaha Mikro
2	Fasilitasi Permodalan dan Monev Program KUR	Rp 100.000.000,00	Terlaksananya fasilitasi permodalan dan monev program KUR	40 orang
XII	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp 1.052.500.000,00		
1	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Rp 245.000.000,00	Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP	150 Koperasi
2	Revitalisasi dan Pembubaran Koperasi Tidak Aktif	Rp 60.000.000,00	Terlaksananya revitalisasi dan pembubaran koperasi tidak aktif	30 Koperasi
3	Temu Usaha Koperasi	Rp 120.000.000,00	Terlaksananya temu usaha koperasi	60 orang
4	Bimtek Dasar - dasar Perkoperasian	Rp 217.500.000,00	Terlaksananya bimtek dasar - dasar perkoperasian	300 orang
5	Bimtek Administrasi Usaha / Akutansi Koperasi (SAK ETAP)	Rp 120.000.000,00	Terlaksananya bimtek administrasi usaha / akutansi koperasi (SAK ETAP)	120 orang
6	Bimtek Manajemen Usaha Koperasi	Rp 120.000.000,00	Terlaksananya bimtek manajemen usaha koperasi	120 orang
7	Bimtek Manajemen Koperasi (PIK)	Rp 50.000.000,00	Terlaksananya bimtek manajemen koperasi	40 orang
8	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola / Pengurus Kopwan	Rp 120.000.000,00	Terlaksananya bimtek peningkatan kapasitas pengelola / pengurus kopwan	100 orang
	TOTAL ANGGARAN	Rp 13.996.189.550,00		

BAB IV

P E N U T U P

Dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di sektor tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012 – 2018 Kabupaten Nganjuk, tujuan dan sasaran dari program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Renja Tahun Anggaran 2019 ini dibuat dengan memperhatikan masukan dari hasil musrenbang di berbagai tingkatan pemerintahan, usulan masyarakat serta *stakeholder* terkait, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas program maupun kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renja yang didasarkan dengan Rancangan Awal RKPD ini memperlihatkan betapa banyaknya usulan kegiatan yang disampaikan dan seringkali usulan tersebut tidak dapat terakomodir dalam postur pendanaan APBD tahun berjalan. Namun Dinas tetap berupaya untuk melaksanakan usulan tersebut dengan mencari skema pendanaan non APBD baik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dari dana APBN Kementrian terkait. Hal ini merupakan bentuk komitmen Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro untuk senantiasa berusaha mengakomodir usulan kegiatan yang masuk sepanjang usulan tersebut memberikan dampak percepatan tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2019 disusun, semoga dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk di sektor ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro.

Nganjuk, Juli 2018
Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Nganjuk

PUTU WINASA, SH.,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199103 1 009